

BIAYA TRANSAKSI EKONOMI BADAN USAHA MILIK DAERAH :
Studi Kasus Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Daerah dan
Perseroan Terbatas di Lingkungan DKI Jakarta
(Oleh: Drs. Sodjuangon Situmorang, MA)

1. Latar **Belakang** Masalah

Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang memuaskan (Rachbini, 1994:46-48).

Semakin berkurangnya pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi setelah berakhirnya periode "boom minyak" dan semakin membengkaknya jumlah hutang luar negeri Indonesia kepada negara-negara donor, mengakibatkan beban APBN dalam mencicil hutang-hutang luar negeri bertambah berat. Misalnya pada tahun anggaran 1995/1996 Pemerintah harus menyisihkan dana sebesar Rp. 17.896,1 miliar dari APBN yang seluruhnya berjumlah Rp. 78.024,2 miliar atau 22,93% untuk membayar hutang-hutang luar negeri (Departemen Keuangan, 1995). Keadaan ini semakin menyadarkan Pemerintah akan kelangkaan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah serta mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif sumber-sumber keuangan lain di luar sektor minyak dan gas bumi.

Dampak dari kelangkaan sumber-sumber keuangan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Pusat, tetapi hal ini lebih dirasakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka pembiayaan kegiatan-kegiatan rutin dan pembangunan di daerah. Sementara itu, porsi Subsidi dan Bantuan Pemerintah Pusat selama ini masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di hampir semua Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Sumber-sumber keuangan Daerah yang dominan saat ini berasal dari

Subsidi Daerah Otonom (SDO), Program Bantuan Inpres serta Sumbangan dan Ganjaran. Sedangkan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II masih relatif kecil, yaitu sebesar 26,15% untuk APBD Tingkat I tahun anggaran 1993/1994 dan sebesar 11,59% untuk APBD Tingkat II tahun anggaran 1993/1994 (BPS, 1995a:xxiv; 1995b:xix).

Salah satu alternatif yang dianggap dan diharapkan masih cukup potensial untuk mengisi kelangkaan sumber-sumber keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut adalah dari euntungan dan/atau hasil penjualan saham BUMN dan BUMD. Walaupun anggapan dan harapan yang demikian sudah sering dilontarkan oleh para pejabat Pusat dan Daerah dan berbagai kebijaksanaan tentang pembinaan dan pengembangan BUMN dan BUMD telah dikeluarkan dan dilaksanakan, namun hingga saat ini BUMN dan BUMD belum dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang berarti atau menentukan (significant) bagi masing-masing APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II yang bersangkutan (Departemen Keuangan, 1995). Hal tersebut terjadi karena kinerja yang ditunjukkan oleh BUMN pada umumnya belum memuaskan (Rachbini, 1994:49).

Melihat kondisi dan potensi yang demikian, baik Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun masyarakat sangat mengharapkan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kinerja BUMN dan BUMD antara lain melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan keuntungan sehingga dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang penting bagi Negara dan Daerah.

Keyakinan tentang adanya peluang BUMN menjadi salah satu sumber keuangan yang potensial untuk menunjang APBN dan/atau untuk membayar hutang-hutang luar negeri Indonesia, juga dikemukakan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada tahun 1995 (Sekretariat Negara, 1995). Meskipun pernyataan-pernyataan Presiden tersebut belum dituangkan ke dalam suatu kebijaksanaan atau peraturan perundang-undangan yang mengikat masyarakat, ucapan Kepala Negara ini oleh **Stephen X K. Walters** (1993) disebut sebagai jawboning, yaitu suatu himbauan atau

permintaan verbal dari seorang tokoh yang sangat berpengaruh, seperti Presiden. Jawboning ini dikategorikannya sebagai salah satu "tools of regulations".

Potensi BUMN dalam mencicil pengembalian hutang-hutang luar negeri Indonesia kepada negara-negara donor sudah mulai tampak dalam kasus penjualan saham PT. INDOSAT di pasar modal internasional baru-bam ini. Harapan seperti terhadap BUMN tersebut juga penulis harapkan dari BUMD (Suara Pembaruan, 1995:247), karena sebagian BUMD memiliki aset dan skala usaha yang cukup besar, seperti Perusahaan Daerah Air Minum, Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Real Estate, dan lain sebagainya. Hingga sekarang harapan-harapan ini belum menjadi kenyataan karena BUMD belum mampu berperan sebagai sumber keuangan Pemerintah Daerah yang berarti. Begitu pula dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dasar hukum pembentukan BUMD di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, salah satu sumber Pendapatan Daerah adalah dari hasil Perusahaan Daerah, ditetapkan bahwa :

Pendapatan Daerah meliputi a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari 1) hasil Pajak Daerah, 2) hasil Retribusi Daerah, 3) hasil Penjualan Daerah, 3) lain-lain hasil usaha Daerah yang sah; b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari 1) sumbangan Pemerintah, 2) sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan; dan c. lain-lain pendapatan yang sah (Sunindhia, Y. W. dan Ninik Widiyanti, 1987:199-200).

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 disebutkan bahwa "si fat Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memben jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan" (Depdagri, 1990:11). Dengan demikian dari kedua peraturan perundang-undangan di atas dapat diketahui bahwa

mi si utama dari Perusahaan Daerah adalah untuk mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum.

Untuk mengetahui kontribusi BUMD kepada APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II antara lain dapat diketahui dari gambaran distribusi realisasi penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II menurut jenis pengeluaran yang diterbitkan oleh BPS Pusat, yaitu pada tahun anggaran 1993/1994 kontribusi BUMD pada APBD Tingkat I sebesar 0,38% dan pada APBD Tingkat II sebesar 0,33% (BPS, 1995a:xxiv, 1995b:xix).

Mengingat pentingnya misi atau fatwa yang diberikan oleh dua Undang-Undang di atas kepada BUMD, yaitu untuk berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan Pemerintah Daerah, dan dikaitkan dengan kelangkaan sumber-sumber keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat akhir-akhir ini, maka upaya atau langkah-langkah penyehatan dan peningkatan kinerja BUMD agar lebih ampu meningkatkan kontribusi kepada APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II menjadi lebih strategis. Mengingat potensi BUMD yang cukup besar dan adanya pehiang untuk meningkatkan kinerja BUMD di masa mendatang, membuat penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUMD dan mencari alternatif-alternatif kebijaksanaan (*policy*) untuk memperbaiki kinerja BUMD. Melalui penerapan alteraatif kebijaksanaan tersebut diharapkan BUMD dapat bekerja lebih efisien, produktif, inenguntungkan. dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keperluan studi kasus ini, penulis telah meneliti beberapa BUMD di lingkungan DKI Jakarta. Adapun dasar pertimbangan untuk memilih BUMD di lingkungan DKI Jakarta sebagai populasi penelitian adalah; (1) Di lingkungan DKI Jakarta terdapat BUMD dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan di daerah lain, yaitu sebanyak 34 buah; (2) Bantuk organisasi BUMD di lingkungan DKI Jakarta memiliki variasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan variasi BUMD di daerah lain. Di DKI Jakarta terdapat 3 (tiga) kelompok BUMD, yaitu, (I) kelompok Perusahaan

Daerah (PD), (ii) kelompok Badan Usaha Daerah (BUD), dan (iii) kelompok Perseroan Terbalas-Perseroan Terbatas Patungan (PT). Dari 34 BUMD yang berada di lingkungan OKI Jakarta dapat dirinci menjadi 7 PD, 11 BUD, dan 16 PT-PT Patungan (Pemerintah DKI Jakarta, 1993c:5-9); (3) Total asset BUMD di lingkungan DKI Jakarta menurut data tahun 1993 lebih kurang Rp. 3.668.507.000.000,- (tiga triliun enam ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta rupiah) adalah suatu potensi ekonomi yang cukup besar apabila dikelola dengan baik (Pemerintah DKI Jakarta, 1993a); (4) Peneliti sebagai aparat pengawas di salah satu instansi Pemerintah memiliki akses untuk memperoleh data mengenai pengelolaan BUMD di lingkungan DKI Jakarta; dan (5) peneliti berdomisili di Jakarta, oleh karena itu lebih mudah melakukan penelitian, baik dari segi waktu maupun biaya.

Kemudian, dari 3 (tiga) bentuk BUMD tersebut, hanya 2 (dua) bentuk BUMD yang diteliti, yaitu PD dan PT. Kedua bentuk BUMD ini sepenuhnya dapat dikategorikan ke dalam organisasi bisnis, sedangkan BUD, seperti Badan Pengelola, Badan Pengembangan Lingkungan, dan Yayasan, walaupun melakukan kegiatan yang berkaitan dengan bisnis, tetapi pengoperasiannya lebih cenderung ke arah organisasi Dinas atau Instansi Pemerintah.

2. Pemmusan Masalah

Memperhatikan kinerja BUMD yang pada umumnya belum memuaskan seperti diuraikan terdahulu, peneliti ingin mempelajari apa yang menjadi faktor-faktor penyebab tingkat kinerja yang demikian. Pendekatan (*approach*) yang penulis gunakan untuk mempelajarinya adalah pendekatan biaya transaksi ekonomi (Coase, 1937; 1960; Williamson, 1979; 1981; 1990b; Evan, 1993). Untuk itu peneliti mempelajari biaya transaksi yang terjadi di dalam BUMD berbentuk PD dan PT. Kemudian peneliti juga mempelajari apakah ada pengaruh aturan-aturan hukum (*rules*) yang menjadi landasan hukum BUMD, struktur organisasi BUMD, kerjasama perusahaan, proses pengambilan keputusan, struktur kepemilikan modal, hubungan keagenan dan perilaku birokrasi yang ada pada perusahaan terhadap tinggi rendahnya biaya transaksi

ekonomi kedua bentuk BUMD (PD dan PT). Selanjutnya peneliti akan mempelajari pengaruh tinggi rendahnya biaya transaksi ekonominya, sehingga patut dijadikan model bentuk organisasi BUMD di masa yang akan datang.

Secara rinci permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam studi ini adalah sebagai berikut : (1) Faktor-faktor dominan apa yang mempengaruhi kinerja PD dan PT ?; (2) Apa saja komponen biaya transaksi ekonomi yang dikeluarkan oleh PD dan PT ?; (3) Bagaimana pengaruh derajat biaya transaksi ekonomi terhadap kinerja PD dan PT ?; (4) Bentuk organisasi perusahaan yang bagaimana yang lebih rendah biaya transaksinya sehingga lebih tepat dibina dan dikembangkan oleh BUMD di lingkungan DKI Jakarta?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai penerapan analisis biaya transaksi ekonomi (*transaction-cost economics*) untuk mengukur tinggi rendahnya biaya transaksi yang terjadi pada 2 (dua) bentuk BUMD, yaitu PD dan PT, serta untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tinggi-rendahnya biaya transaksi ekonomi yang selanjutnya mempengaruhi kinerja kedua bentuk BUMD tersebut.

Apabila tujuan di atas dapat dicapai maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi penulis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat, dan bagi instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) yang berwenang membina dan mengembangkan BUMD.

3.1 Tujuan Penelitian

Secara rinci tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengoperasian PD dan PT;
- Mengkaji struktur organisasi PD dan PT;
- Mengkaji kerjasama perusahaan PD dan PT;
- Menelaah proses pengambilan keputusan di lingkungan PD dan PT berdasarkan aturan-aturan (*rules*) yang menjadi landasan

- beroperasinya kedua bentuk BUMD dimaksud;
- e. Mengkaji struktur kepemilikan modal PD dan PT;
 - f. Mengkaji tentang hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemilik (principal) dan karyawan dari PD dan PT (*agent*);
 - g. Mengkaji pengaruh birokratisme terhadap biaya transaksi ekonomi dan selanjutnya mengkaji pengaruh derajat biaya transaksi ekonomi terhadap kinerja PD dan PT;
 - h. Mengidentifikasi komponen-komponen biaya transaksi ekonomi dari PD dan PT;
 - I. Mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi biaya transaksi ekonomi;
 - j. Membandingkan biaya transaksi di antara kedua bentuk BUMD tersebut dan mengidentifikasi biaya transaksi BUMD mana yang paling minimal sehingga dianggap lebih layak (*feasible*) eksis dan dikembangkan untuk masa mendatang;
 - k. Mengukur kinerja keuangan dari PD dan PT di lingkungan DKI Jakarta berdasarkan Neraca Perusahaan dan hasil audit Akuntan Publik dan BPKP selama periode 1990-1994, untuk diperbandingkan dengan menggunakan analisis rasio.
- b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Penerapan analisis biaya transaksi ekonomi terhadap BUMD sebagai organisasi bisnis yang berada di lingkungan organisasi publik. dalam hal ini Pemerintah Daerah, merupakan salah satu pendekatan yang relatif baru dan belum banyak dipergunakan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi yang berkaitan dengan kebijaksanaan publik dan bisnis.
 - c. Bagi Masyarakat. Penerapan analisis biaya transaksi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja BUMD dalam rangka peningkatan keuntungan. yang selanjutnya akan disumbangkan pada APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II serta sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan keniayarakatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat umumnya, apalagi mengingat BUMD adalah milik bersama masyarakat Daerah.
 - d. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan penting bagi Pemerintah, khususnya bagi pejabat atau instansi yang berwenang menetapkan kebijaksanaan publik tentang BUMD. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang BUMD, terutama untuk melihat kesesuaiannya dengan perkembangan dunia usaha yang semakin bersaing.

3.2 Manfaat Penelitian

Sebagaimana dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat, bagi pemerintah ;

- a. Bagi penulis. Penelitian ini sangat menarik perhatian penulis mengingat bahwa BUMD yang dimiliki oleh 27 Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan 304 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, memiliki asset dengan nilai yang cukup besar, tetapi hingga sekarang potensinya masih tidur dan belum mampu berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah. Oleh karena itu peneliti merasa terpenggil untuk mencari alternatif pemecahan guna meningkatkan kinerja BUMD di masa mendatang.

4. Metodologi Penelitian

4.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*) (Faisal. 1989 : 20-21) yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan kJarifikasi atas fenomena atau fakta biaya transaksi ekonomi yang terjadi pada BUMD berbentuk PD dan PT di lingkungan DKI Jakarta.

Dalam penerapan metode deskriptif dimaksud, peneliti memusatkan perhatian pada:

(1) biaya transaksi ekonomi yang terjadi pada BUMD milik Pemerintah OKI Jakarta berbentuk PD dan PT; (2) fakta tentang masalah-masalah biaya transaksi pada BUMD milik Pemerintah OKI Jakarta berbentuk PD dan PT; dan dilanjutkan dengan (3) interpretasi rasional yang memadai (adequate) terhadap fakta-fakta dimaksud.

Untuk tujuan tersebut di atas peneliti akan menggunakan perpaduan beberapa bentuk metode deskriptif, yaitu: (1) survey studies: survey kelembagaan dan analisis dokumenter; (2) interrelationship studies: studi kasus; (3) developmental studies: studi pertumbuhan (growth studies) dengan menggunakan teknik longitudinal (longitudinal techniques), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beberapa obyek yang sama dengan mengurutkan gejala pertumbuhan dan perkembangannya dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang aspek-aspek yang berlaku umum bagi obyek-obyek yang sejenis (Nawawi, 1991:63-78). Dengan perkataan lain, penelitian ini menggunakan beberapa metode secara simultan, yaitu survey kelembagaan, studi kasus, dan studi pertumbuhan dengan teknik longitudinal.

4.2 Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut: a. Teknik Komunikasi Langsung (Interview dan Questionnaire); b. Teknik Pengamatan. c. Teknik/Studi Dokumentasi (Nawawi, 1991:110-133).

4.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian biaya transaksi ekonomi pada BUMD milik Pemerintah OKI Jakarta ini mencakup kerangka hukum, pengorganisasian transaksi, hubungan keagenan, kadar birokratisme dan implikasinya terhadap kinerja BUMD.

Unit analisisnya adalah biaya transaksi ekonomi pada kelompok PD dan kelompok PT.

di mana kedua bentuk perusahaan tersebut mewakili bidang usaha (core business) yang sama, yaitu usaha di bidang konstruksi dan properties, usaha di bidang industri pariwisata, dan usaha di bidang perdagangan dan jasa.

4.4 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 23 BUMD milik Pemerintah DKI Jakarta yang terdiri dari 7 PD dan 16 PT (Pemerintah DKI Jakarta, 1993a:5-7). Sementara itu, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling (penarikan sampel secara sengaja), yaitu penarikan sampel non-probabilita, di mana terdapat kondisi yang tidak memungkinkan bagi peneliti untuk memilih unit-unit sampel (Malo, 1986:167-168).

Jumlah sampel penelitian ini adalah 6 (enam) BUMD dengan rincian 3 PD dan 3 PT. Perincian keenam BUMD yang menjadi unit-unit sampel tersebut adalah: a. Perusahaan Daerah: (i) PD Pembangunan Sarana Jaya dengan bidang usaha konstruksi dan properties; (ii) PD Wisata Niaga Jaya dengan bidang usaha industri pariwisata; (iii) PD Pasar Jaya dengan bidang usaha perdagangan dan jasa; b. Perseroan Terbatas: (i) PT Pembangunan Jaya dengan bidang usaha konstruksi dan properties; (ii) PT Pembangunan Jaya Ancol dengan bidang usaha industri pariwisata; dan (iii) PT Food Station Cipinang Jaya dengan bidang usaha perdagangan dan jasa. Pemilihan sampel secara sengaja dilakukan dengan alasan bahwa peneliti ingin membandingkan 2 (dua) bentuk BUMD, yaitu PD dan PT milik Pemerintah DKI Jakarta. Unit-unit sampel yang dipilih diharapkan dapat mewakili semua core business yang ada pada kedua bentuk BUMD tersebut.

Sebagaimana diuraikan terdahulu, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 849 Tahun 1994, ada 5 (lima) kelompok bidang usaha BUMD milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu (1) usaha perdagangan dan jasa, (2) usaha konstruksi dan properties, (3) usaha perbankan dan lembaga keuangan, (4) usaha pelayanan umum/utilitas, (5) usaha industri pariwisata (SK Gubernur KDKI Jakarta No. 849, 1994). -j

Pada BUMD yang berbentuk PD, kelima bidang usaha tersebut semuanya ada. Tetapi pada BUMD berbentuk PT hanya terdapat 3 (tiga) bidang usaha, yaitu (1) usaha konstruksi dan properties, (2) usaha industri pariwisata, (3) usaha perdagangan dan jasa. Dua bidang usaha lainnya tidak terdapat pada BUMD berbentuk PT, yaitu (1) usaha perbankan dan lembaga keuangan dan (2) usaha pelayanan umum/utilitas.

Oleh karena itu, untuk menjamin ketepatan (*accuracy*) perbandingan di antara kedua bentuk BUMD tersebut, peneliti menetapkan bahwa perbandingan hanya dilakukan terhadap PD dan PT dengan bidang usaha yang sama, yaitu (1) usaha perdagangan dan jasa, (2) usaha konstruksi dan properties, dan (3) usaha industri pariwisata.

Dengan menggunakan teknik dan melalui proses seperti tersebut di atas, BUMD milik Pemerintah DKI Jakarta yang dipilih sebagai sampel studi ini adalah seperti tertera dalam tabel berikut:

5. Landasan Teori

5.1. Pengertian Biaya Transaksi

Sebagaimana dikatakan oleh Milgrom dan Roberts (1990:57) studi ekonomi di bidang organisasi dan manajemen adalah bidang studi relatif baru yang berupaya menganalisis struktur internal dan bekerjanya organisasi ekonomi, kegiatan bagian-bagian di dalam organisasi, dan hubungan manajerial di antara mereka baik melalui mekanisme pasar ataupun melalui mekanisme lainnya, sampai dengan hal yang lebih luas lagi mengenai organisasi.

Pendekatan yang terpenting mengenai hal tersebut di atas adalah 'transaction-cost economies' sebagaimana diperkenalkan oleh Coase (1937:1960) dan dikembangkan lebih lanjut oleh beberapa pakar lain, dan yang terutama adalah Oliver E. Williamson (1975:1985). Inti teori Coase mengatakan bahwa aktivitas ekonomi cenderung diorganisir secara lebih efisien. Oleh sebab itu keinginan untuk memaksimalkan jumlah kekayaan adalah menjadi tujuan. Dalam hubungan ini, ada dua macam bias yang biasanya dapat diidentifikasi, yaitu biaya produksi dan distribusi fisik dan biaya pertukaran.

Populasi		Sample	
Penisahaan Daerah	Perseroan Terbatas	Penisahaan Daerah	Perseroan Terbatas
1. PD Ail Minum Jaya	1. PT Food Station Tjipiing Jaya	1. PD Pembangunan Saiana Jaya	1. PT Food Station Tjipiing Jaya
2. PD Pembangunan Sarana Jaya	2. PTJIEP	2. PD Wisata Niaga Jaya	2. PT Pembangunan Jaya
3. PD Dhannft Jaya	3. PT Pembangunan Jaya	3. PD Pasar Jaya	3. PT Pembangunan Jaya Anool
4. PD Wisata Niaga Jaya	4. PT Delta Jakarta		
5. PD Pasar Jaya	5. PT Bwnu Grafika Jaya		
6. PD Penzolahan Air Limbah	6. Alumindo Pettasa		
7. Bunk DKI	7. PTKBN		
	8. PT Deteminan Indah		
	9. PT Rthax Armada		
	10. PT Rheemlindo		
	11. PT Abataii Surya Jaya		
	12. PTCemani Toka		
	13. PTPakuan		
	14. PT Pembangunan Jaya Ancol		
	15. PTGrahft Sari Suryajaya		
	16. PT Pulomas Gemala Mison		

Kedua macam biaya tersebut dapat dibedakan dan dipisahkan, oleh karena itu hipotesis tentang efficiency adalah bagaimana meminimalkan biaya transaksi. Maksudnya penentuan bagian-bagian kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam perusahaan atau di pasar, tergantung dari apakah transaksi yang dilakukan di pasar lebih efisien dibandingkan dengan apabila dilakukan di dalam perusahaan.

Pendekatan ini mengandung dua masalah konseptual, yaitu biaya total (total cost) suatu perusahaan tidak dapat dinyalakan seperti menyatakan jumlah biaya produksi, karena biaya produksi hanya tergantung pada teknologi dan bahan baku yang dipergunakan, sedangkan biaya transaksi hanya dapat ditentukan oleh cara transaksi itu diorganisir. Pada umumnya kedua macam biaya tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama. Organisasi yang efisien tidak hanya dengan cara meminimalkan biaya transaksi,

Jika lembaga atau peraturan yang ada menjadi efisien, seseorang dapat mengatakan bahwa kesimpulan itu terlalu sederhana karena pengamat yang bersangkutan tidak mengenali semua biaya-biaya transaksi yang relevan. Maka untuk memperkuat teori dan kemampuan peramalan teori tersebut yang bersifat spesifik, pengembangan teori biaya transaksi ekonomi telah memusatkan perhatian untuk mengidentifikasi komponen-komponen biaya transaksi yang utama dan bagaimana mereka mempengaruhi bentuk organisasi yang efisien.

Untuk tujuan itu Milgrom dan Roberts (1990:58) menambahkan dua elemen penting ke dalam teori transaction-cost economies' yaitu (1) bargaining cost, (2) influence cost.

Terdapat banyak variasi dalam kecenderungan pertukaran. Dari pihak yang melakukan transaksi, pertukaran dapat dilakukan antar orang, antar orang dan lembaga, antar masyarakat dan antar negara. dari segi frekuensi pertukaran dapat berlangsung satu kali atau berulang kali. dari segi cara pertukaran dapat terjadi pertukaran antar pihak yang saling otonom (market mechanism of exchange) dan dapat juga antar pihak yang sama-sama terikat dalam organisasi (hierarchies).

Definisi biaya transaksi telah dikemukakan oleh banyak orang, antara lain oleh Kirchner dan Picot (1987) yang mengatakan bahwa biaya transaksi adalah:

cost that arise from defining goods and services and enforcing exchange. Transaction cost imply all the resources that have to be sacrificed in order to arrive at mutually acceptable agreement for exchange of goods or services between two or more parties (dikutip dalam North 1990a:184).

Oliver E. Williamson (1975;1979;1985) mengajarkan bagaimana harus memilih mekanisme pertukaran, yang disebutnya sebagai 'governance structure of transaction' agar biaya transaksi dapat diminimalkan. Menurut Williamson (1979), untuk memahami seluk-beluk transaksi atau pertukaran, maka harus diketahui 'the crucial dimensions of transaction'. Dimensi-dimensi krusial transaksi tersebut terdiri dari spesifitas aset, frekuensi keberulangan transaksi dan ketidakpastian. Kombinasi antara ketiga dimensi ini memunculkan berbagai struktur pengaturan transaksi.

'Transaction-specific investment' adalah transaksi yang nilai investasinya akan jatuh, karena itu merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi, bilamana salah satu pihak memindahkan hubungan transaksionalnya dengan pihak lain. Bila A melakukan transaksi dengan B, dan apabila dalam transaksi tersebut nilai investasi A akan jatuh pada saat memindahkan transaksinya dengan C (demikian pula yang akan terjadi jika B yang melakukan pemindahan transaksional), maka investasi transaksi spesifik antara A dan B terjadi. Menurut Williamson (1979) transaksi semacam ini disebut idiosyncratic.

Struktur pengaturan untuk transaksi spesifik atau transaksi idiosinkratik rentan terhadap frekuensi keberulangan dan kepastian transaksi. Meskipun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa semakin sering pengulangan transaksi dan makin tinggi ken dak-past lan. semakin perlu transaksi spesifik dijalankan dalam organisasi hierarchies.

5.2. Jenis-jenis Biaya Transaksi Ekonomi

Bagaimanapun baik dan tepatnya struktur pengaturan dipilih, biaya transaksi akan tetap tidak terhapuskan. biaya transaksi akan tetap tidak terhapuskan kecuali asumsi-asumsi yang melandasi pendekatan ini tidak terbukti lagi secara empirik, yaitu imperfect information, bounded rationality dan opportunistic behaviour, dengan demikian identifikasi jenis-jenis biaya transaksi tergantung pada bagaimana orang melilah-milah mekanisme pertukaran. Menurut Kirchner dan Picot (1987:64) terdapat kesepakatan yang cukup luas tentang komponen-komponen umum biaya transaksi yaitu: (1) biaya pencarian informasi, (2) biaya pembuatan kontrak (negosiasi dan formulasi kontrak), (3) biaya monitoring (pengecekan kualitas, kuantitas, harga, ketepatan waktu pengiriman, keamanan), dan (4) biaya adaptasi (sejama pelaksanaan kesepakatan).

6. Hasil temuan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja PD lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PT. yang dibuktikan dengan penampilan PD yang kurang baik dibandingkan dengan PT dalam hal angka rata-rata *Rate of Return on Investment (ROI)*, perkembangan aktiva, laba, kontribusi kepada APBD dan opini Akuntansi Publik atau BPKP per tahun. Dapat disimpulkan bahwa Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) dari PD lebih tinggi dari Biaya Transaksi Ekonomi (BTE) dari PT.

Kinerja PD yang lebih rendah dibandingkan kinerja PT dibuktikan dengan angka rata-rata ROI per tahun: PD sebesar 1,68% dan PT sebesar 12,66%; angka rata-rata perkembangan aktiva per tahun PD sebesar 23,49% dan PT sebesar 38,74%; angka rata-rata perkembangan laba bersih per tahun: PD sebesar 22,15% dan PT 84,32%; dan opini Akuntansi Publik dan BPKP dengan nilai sebesar 1,92 untuk PD dan 2,75 untuk PT. Selain itu diketahui bahwa:

1. Kerangka hukum BUMD berdasarkan UU nomor 5 tahun 1962 tentang PD tidak sesuai lagi dengan kebutuhan BUMD di lingkungan DKI Jakarta.
2. Sentralisasi proses pengambilan keputusan BUMD di tangan 'birokrasi' meningkatkan biaya transaksi ekonomi.

3. Penggunaan struktur fungsional atau struktur matriks pada suatu BUMD, sedang penggunaan struktur matriks yang dikombinasikan dengan the holding company structure menunjukkan korelasi positif dengan kinerja perusahaan.
4. Kerjasama perusahaan (jangka panjang) dengan pola 'myriad hybrid organizational' atau 'keiretsu' belum banyak dipergunakan oleh BUMD di lingkungan DKI Jakarta, kecuali PT Pembangunan Jawa.
5. Pengaruh birokratisme pada PD lebih besar ketimbang pada PT.
6. Biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi pada kelompok PD lebih besar dibandingkan dengan pada kelompok PT.
7. Masalah keagenan terjadi baik pada PD maupun PT dan terlihat keinginan yang besar dari para manajer untuk memperbesar laba yang ditahan dalam rangka investasi yang mereka kendalikan.
8. Kinerja BUMD berbentuk PD lebih rendah ketimbang BUMD berbentuk PT. Sebagai saran dalam penelitian ini antara lain:
 1. Kerangka hukum BUMD perlu dievaluasi, diregulasi dan deregulasi agar berfungsi sebagai 'institutional arrangement' yang efisien dan efektif dalam menjalankan kebijakan publik.
 2. Meningkatkan desentralisasi pengambilan keputusan BUMD.
 3. Menyempurnakan struktur organisasi BUMD sesuai kebutuhan usaha (corporate strategy) seperti struktur multidivisi, the holding company structure, strategic business units dan networks.
 4. Meningkatkan kerjasama perusahaan (jangka panjang) dengan pihak ketiga dengan pola 'myriad hybrid organizational' atau 'keiretsu'.
 5. mengurangi birokratisme pada PD dengan cara mengurangi jumlah pegawai dengan status PNS; mengakhiri pemberian eselonering; meningkatkan entrepreneurship; memperbaiki pola karir; dan meninjau status BUMD sebagai perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I.
 6. Meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BUMD terutama terhadap biaya-biaya yang berpotensi sebagai biaya transaksi ekonomi.
 7. Meningkatkan pengendalian perilaku 'street level bureaucracy' dan mengkaji ulang masalah "separation of ownership and control" pada BUMD.

8. Menerapkan pendekatan biaya transaksi ekonomi khususnya dalam menangani permasalahan BUMD, dan umumnya dalam menangani permasalahan Pemerintah Daerah.
9. membenahi manajemen BUMD secara BUMD komprehensif yang mencakup intellectual agenda (vision, strategic intent dan business startegy positioning and organization), management agenda (struktur, dsb) dan behavioural agenda (mlai. etik, dan skill perusahaan).
10. Membentuk lembaga (Dinas) di lingkungan DKI Jakarta yang mempunyai fungsi lini dan bekerja secara profesional dalam membina BUMD.

Daftar Pustaka

- Alt, James E. dan Kenneth A. Shelpse** (eds). 1990. *Perspectives On Positive Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Aoki, Masahiko, Bo Gustafsson dan Oliver E. Williamson** (eds). 1990. *The Firm as a Nexus of Treaties*. London: Sage Publications.
- Barney, Jay B. dan William G. Ouchi** (eds.). 1986. *Organizational Economics : Toward a New Paradigm for Understanding and Studying Organizations*. San Francisco/London : Jossey-Bass Publishers.
- Bennis, Warren**. 1993. "Foreward". In **Gifford & Elizabeth Pinchot**. *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*. San Francisco : Berret-Koehler Publishers.
- Biro Pusat Statistik**. 1995a. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I 1990/1991-1993/1994*. Jakarta : Penerbit EPS.
- Bromley, Daniel W.** 1989. *Economic Interest and Institutions : The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Basil Blackwell.
- Buckley, Martin W.** 1990. *The Structure of Business*. 2nd eds. London : Pitman Publishing.
- Burstein, Daniel**. 1993. *Turning the Tables : A Machiavellian Strategy for Dealing with Japan*. New York : Simon & Schuster.
- Cheema, G. Shabbir dan D.A. Rondinelli** (eds.). 1983. *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London : Sage Publications.
- Coase, Ronald H.** 1937. "The Nature of the Firm". *Economica* 4, hal. 386-405.
- Coase, Ronald H.** 1960. "The Problem of Social Cost". *Journal of Law and Economics* 3, hal. 1-44.
- Cohen, Steven dan Ronald Brand**. 1993. *Total Quality Management in Government : A Practical Guide for the Real World*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Cyert, R. dan J. March**. 1963. *A Behavioral Theory of the Firm*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.
- Davis, Kevin dan Ian Harper** (eds.). 1993. *Privatization : The Financial Implications*. St. Leonards, NSW : Allen & Unwin.
- Douma, Sytse dan Hein Schreuder**. 1992. *Economic Approaches to Organizations*. New York: Prentice-Hall.



- Ekelund, Robert B., Jr. dan Robert D. Tollison.** 1988. *Economics*. 2nded. Boston ; Scott. Foresraan & Company.
- Evan, William M,** 1993. *Organization Theory : Research and Design*. New York : MacMillan Publishing Company.
- Faisal, Sanapiah.** 1989. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta : Raja wali Pers.
- Kama, E.F. dan M.C. Jensen.** 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics* vol. 26 (2), hal. 301-325.
- Garvey, Gerald.** 1993. *Facing the Bureaucracy : Living and Dying in a Public Agency*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
- Hamel, Gary dan C. R. Prahalad.** 1994. *Competing for the Future*. Boston : Haarvard Business School Press.
- Hardjosoekarto, Sudarsono.** 1993. "Problem-problem Kelembagaan Koperasi : Nokyo dan KUD. "*JUS : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 4, hal. 3-14.
- Harrington, Diana R. dan Brent D. Wilson.** 1991. *Corporate Financial Analysis*. 3rd ed. Tokyo : Toppan Company, Ltd.
- Hoesein, B hen yam in** 1995. *Desentraisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia : Akan Berputarkah Roda Desentraisasi dari Efisiensi ke Demokrasi?* Jakarta : Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia.
- Hogwood, Brian W. dan Guy B. Peters.** 1985. *The Pathology of Public Policy*. Oxford : Clarendon Press.
- Ikatan Akuntan Indonesia.** 1983. *Norma Pemehksaan Akuntan*. Jakarta : PT Penerbit dan Balai Buku "Ikhtiar Baru".
- Ingraham, Patricia W., Barbara S. Romzck & Associates.** 1994. *New Paradigms for Government : Issues for the Changing Public Sen'ice*. San Francisco : Jossey-Bass Publishers.
- Jensen, M. C. dan W. H. Meckling** 1976. "The Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Capital Structure". *Journal of Financial Economics* 3, hal. 305-360.
- Johnson, Gerry dan Kevan Sholes.** 1993. *Exploring Corporate Strategy : Text and Cases*. 3rd ed. New York : Prentice Hall.
- Ranter, Rosabeth Moss; Barry A. Stein dan Todd D. Jick.** 1992. *The Challenge of Organizational Change : How Companies Experience It and Leaders Guide It*. New York : The Free Press.
- Kao, Raymond W.Y.** 1995. *Entrepreneurship : A Wealth-Creation and Value-Adding Process*. New York : Prentice Hall.
- Kasim, Azhar** 1993. *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fe-UI & Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial - Universitas Indonesia.
- Keuning, Doede dan Wilfrid Opheij.** 1994. *Delaying Organizations : How to Beat Bureaucracy and Create a Flexible and Responsive Organization*. London : Pitman Publishing.
- Kirkpatrick, C. H. ; N. Lee dan F.t Nixon** 1984. *Industrial Structure and Policy in Less Developed Countries*. London : George Alien & Unwin.
- Robert, Norman.** 1995. *Cut the Fat, Not the Muscle : Cost-Improvement Strategies for Long-Term Profitability*. New York : Prentice-Hall.
- Kreps, D. M.** 1984. "Corporate Culture and Economic Theory". *Unpublished Manuscript, Stanford University, Graduate School of Business*.
- Lane, Jan-Erik.** 1993. *The Public Sector : Concepts, Models and Approaches*. London: Sage Publications.
- Lange, O.** 1938. "on the Theory of Economic Socialism". Di dalam B. Lippmcott (ed.). *On the Economi&Theory of Socialism..*

- Minneapolis : University of Minnesota Press, hal. 55-143.
- Lewis, Jordan D.** 1990. *Partnerships for Profit : Structuring and Managing Strategic Alliances*. New York : The Free Press.
- Lipsky, Michael.** 1980. *Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York : Russel Sage Foundation.
- Lubis, S.B. Hari dan Martani Huseini.** 1987. *Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta : Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Malo, Manasse.** 1986. *Buku Materi Pokok Metode Penelitian Sosial : ADNE 42J6/3SKS/MODUL 1-5*. Jakarta : Penerbit Karunika, Universitas Trebuka.
- March, J.G. dan J. P. Olsen** (ed). 1976. *Ambiguity and Choice in Organizations*. Oslo ; Universitetsforlaget.
- McLean, lain.** 1987. *Public Choice : An Introduction*. Oxford : Basil Blackwell.
- Milgrom, Paul and John Roberts.** 1990. "Bargaining and Influence Costs and the Organization of Economic Activity". Di dalam **Alt, James E. dan Kenneth A. Shepsle** (ed.). *Perspectives on Positive Political Economy*. Cambridge ; Cambridge University Press.
- Milgrom, Paul and John Roberts.** 1992. *Economics, Organization and Management*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hill International, Inc.
- Mintzberg, Henry.** 1983. *Structure in Fives : Designing Effective Organizations*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall, Inc.
- Moe, T. M.** 1984. "The New Economics of Organization". *American Journal of Political Science* 28, 739-777.
- Nawawi, Hadari, H.** 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nellis, Joseph G. dan David Parker.** 1992. *The Essence of Business Economics*. New York: Prentice Hall. **North, Douglass C.** 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge/New York : Cambridge University Press. **O'Dell, William F.** 1991. *Effective Business Decision Making : ... and the Educated Guess*. Lincolnwood, IL : NTC Business Books.
- Osborne, David dan Ted Cat-bier** 1992. *Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York : A Plume Book.
- Pranoto, Toto; Yuli Setiono dan Ferdy Nggao.** 1994. *Strategi Pembiayaan dan Regouping BUMN : Upaya Menciptakan Sinergi dalam rangka Peningkatan Daya Soring BUMN*. Jakarta : Lembaga Manajemen FE UI.
- Prottas, Jeffery M.** 1979. *People-Processing: The Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies*. Lexington/Toronto : Lexington Books.
- Quade, E. S.** 1982. *Analysis for Public Decisions*, 2nd ed. New York : North-Holland.
- Rachbini, Didik J.** 1994. *Politik Deregulasi dan Agenda Kebijakan Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Info Bank. **Reksoprayitno, Soediyono.** 1991. *Analisis Laporan Keuangan : Analisis Rasio*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Richardson, Peter R.** 1988. *Cost Containment : The Ultimate Advantage*. New York : The Free Press.
- Ricketts, Martin.** 1994. *The Economics of Business Enterprise : An Introduction to Economic Organization and the Theory of the Firm*. 2nd ed. New York : Harvester Wheatsheaf.
- Romano, Roberta.** 1993. *Foundations of Corporate Law*. New York ; Oxford University Press.

- Ross, Stephen A.; Randolph W. Westerfield and Jeffrey F. Jaffe.** 1993. *Corporate Finance*. 3rd ed. Boston : Richard D. Irwin, Inc.
- Rumelt, Richard P.; Dan E. Schendel dan David J. Teece** (ed.). 1994. *Fundamental Issues in Strategy : A Research Agenda*. Boston, MA : Harvard Business School Press.
- Savas, E. S.** 1987. *Privatization : The Key to Better Government*. Chatham, NJ ; Chatham House Publishers. Inc.
- Self, Peter.** 1993. *Government by the Market? : The Politics of Public Choice*. London : The MacMillan Press, Ltd.
- Shank, John K. dan Vijay Govindarajan** 1993. *Strategic Cost Management : The New Tool for Competitive Advantage*. New York : The Free Press.
- Silver, A. David.** 1993. *Strategic Partnering : How to Join Forces with Other Companies to Get Capital, Research and Development, Marketing, Product Testing, and Sales Support*. New York : McGraw-Hill, Inc.
- Sitompul, Toga.** 1994. "Pengukuran Kinerja Perusahaan sebagai Alat Peningkatan Efisiensi Perusahaan Operasi BUMN". Di dalam Toto Pranoto, Yuli Setiono, dan Ferdy Nggao (penyunting). 1994. *Strategi Pembiayaan & Regrouping B UMN : Upaya Menciptakan Sinergi dalam rangka Peningkatan Daya Saing BUMN*. Jakarta : Lembaga Management FE-UI, hal. 41-56.
- Stace, Doug dan Dexter Dunphy** 1994. *Beyond the Boundaries : Leading and Re Creating the Successful Enterprise*. New York : McGraw-Hill Book Company Sidney.
- Suara Pembaruan, Tim (ed.).** 1995. *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sunindhia, Y. W. dan Ninik Widiyanti** 1987. *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*. Jakarta : Penerbit PT Bina Aksara. **Tjokrowinoto, Moeljarto.** 1987. *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta : Penerbit PT Tiara Wacana Yogya.
- Tompkins, Jim.** 1995. *The Genesis Enterprise : Creating Peak-to-Peak Performance*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Walsh, Ciaran.** 1993. *Key Management Ratios : How to Analyse, Compare, and Control the Figures that Drive Company Value*. London: Pitman Publishing.
- Walters, Stephen J.K.** 1993. *Enterprise, Government, and the Public. International ed.* New York : McGraw-Hill, Inc.
- Weston, J. Fred, Kwang S. Chung dan Susan E. Hoang.** 1990. *Mergers, Restructuring, and Corporate Control*. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall International, Inc.
- Williamson, Oliver E.** 1975. *Markets and Hierarchies : Analysis and Antitrust Implications*. New York : The Free Press.
- _____. 1979. "Transaction-Cost Economics : The Governance of Contractual Relations". *Journal of Law and Economics* 22, Oktober, hal. 233-261.
- _____. 1981a. "The Economics of Organization : The Transaction Cost Approach". *American Journal of Sociology* 87, hal. 548-577.
- _____. 1981b. "The Modern Corporation : Origins, Evolution, Attributes". *Journal of Economic Literature* 19, hal. 1537-1568.
- _____. 1985. *The Economic Institutions of Capitalism : Firms, Markets, Relational Contracting*. New York/London : The Free Press.
- _____. 1986. *Economic Organization : Firms, Markets, and Policy Control*. Brighton: Wheatsheaf.
- _____. (ed.). 1990a. *Organization Theory : From Chester Barnard to the Present and Beyond*. New York/Oxford : Oxford University Press. _____ (ed.). 1990b. *The Economic Institution of Capitalism ; Firms, Markets, Relational Contracting*. New York/Londoni; The Free Press.

Woelfel, Charles J. 1984. *Mamantau Kesehatan Perusahaan melalui Laporan Keuangan*. Jakarta : Penerbit Abdi Tandur.

Wonnacott, Paul dan Ronald Wonnacott 1986. *Economics*. 3rd ed. New York : McGraw-Hill International Series.

BAHAN LAINNYA:

Departemen Dalam Negeri. 1990. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pentsahaan Daerah*. Jakarta : Ditjen PUOD, Departemen Dalam Negeri RI.

_____. 1993a. "*Risalah Rapal Perumusan Tim Kecil RVU dan RPP tentang Perusahaan Daerah*". Jakarta: Tidak dipublikasikan.

_____. 1993b. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Daerah*. Jakarta : Ditjen PUOD, Departemen Dalam Negeri.

Departemen Keuangan. 1995. "Lampiran Nota Keuangan Pengantar RAPBN Tahun 1995/1996". *Pidato Presiden RI di depan Sidang Paripurna DPR-RI*. Jakarta : Departemen Keuangan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam dua bentuk PERUMDA dan PERSERODA.

Jaya, Eko, CV. 1994. *Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah 1993*. Jakarta : Penerbit CV Eko Jaya.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor 1359 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pengawas PD dan BUMD dalam Lingkungan Pemerintahan DKI Jakarta.

_____. Nomor 1369 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Keuangan PD dan BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.

_____. Nomor 484 Tahun 1994 tentang *DKI*,man Penyusunan Rencana Jangka Panjang BUMD Pemerintah DKI Jaya.

Pemerintah DKI Jakarta. 1992a. *Laporan Keuangan PD dan PT Milik Pemerintah DKI Jakarta 1987-1992*. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1993a. *Asset BUMD/BUD Jakarta*. Jakarta : Biro Bina Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1993b. *Laporan Evaluasi Kegiatan BUMD Pemerintah DKI Jaya*. Jakarta : Biro Bina Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1993c. *Laporan Kegiatan PD/BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dari Tahun 1987 s.d. 1991*. Jakarta : Biro Bina Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1993d. *Laporan Kegiatan PD/BUMD di Lingkungan Pemerintah DKIJaya 1993*. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah. Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1994a. "*Lampiran Keputusan Gubernur KDH No. 849 Tahun 1994*". Jakarta : Biro Hukum Setwilda, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1994b. *Himpunan Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta tentang Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta*. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1994c. *Himpunan Keputusan Gubernur KDH DKI Jakarta tentang Perusahaan Daerah*. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.

_____. 1994d.

Himpunan Peraturan Daerah DKI Jakarta. Jakarta : Biro Hukum Setwilda, Pemerintah DKI Jakarta.

- _____. 1994e. *Himpunan Peraturan Kepegawaian tentang Badan Usaha Milik Daerah, Jakarta : Biro Kepegawaian, Pemerintah DKI Jakarta.*
- _____. 1994f. *Himpunan Peraturan Kepegawaian tentang Badan Usaha Milik Daerah. Jakarta : Biro Kepegawaian, Pemerintah DKI Jakarta.*
- _____. 1994g. *Himpunan Peraturan tentang Perusahaan Daerah. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.*
- 1994h. *P*
Keuangan u
b
likasi
Perusahaan
Perseoran
Perkemhangan Daerah, Badan Pengelola Unit Terbatas, dan Badan Pengelola Unit Usaha Pemerintah DKI. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.
- _____. 1994i. *Publikasi Biro Sarana Perekonomian Daerah Pemda DKJ Tahun 1994. Jakarta : Biro Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.*
- _____. 1995. *Profil Perusahaan Patungan Milik Pemerintah DKI Jakarta. Jakarta : Biro Bina Perekonomian Daerah, Pemerintah DKI Jakarta.*
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor : 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKJ Jakarta.*
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor : 6 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor : 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKJ Jakarta.*
- Peraturan Daerah DKJ Jakarta Nomor : 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar DKI Jakarta.*
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor : 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal DKJ Jakarta pada Pihak Ketiga.*
- Permendagri Nomor : 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.*
- Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.*
- Sekretariat Negara** 1995. "Pidato Kenegaraan Presiden JU pada tanggal 17 Agustus 1995". Jakarta : Sekretariat Negara.
- SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Jbukota Jakarta Nomor : 849 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penilaian Kinerja BUMD di Lingkungan Pemerintah DKI Jakarta.*
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 4 Tahun 1984 dan Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan PDAM.*
- Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*
- Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.*
- Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.*
- Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*